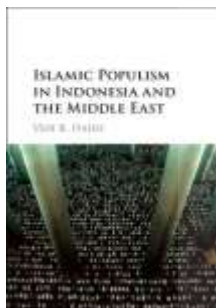


RESENSI BUKU

KELUAR DARI ORTODOKSI KAJIAN ISLAM POLITIK: KOMPARASI MESIR, TURKI, DAN INDONESIA

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma

Institute of Southeast Asian Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
bayumitraa.kusuma@yahoo.com



Judul : Islamic Populism in Indonesia and the Middle East
Penulis : Vedi R. Hadiz
Penerbit : Cambridge University Press
Terbit : 2016
Tebal : 240 halaman
ISBN : 978-1-107-12360-1

Hubungan antara Islam dan politik terus menjadi isu yang relevan dan aktual dari studi politik, agama, ataupun kebudayaan. Secara umum, pemikiran politik Islam merupakan sintesis dari konsep kepemimpinan yang dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam dan ajaran Islam itu sendiri dengan tradisi bangsa-bangsa yang pernah ditaklukan seperti Syria, Mesir, Persia dan Mongol. Dari data yang dapat dilacak, karya pertama yang membahas masalah-masalah ilmu tata negara dari perspektif Islam secara sistematis adalah bab politik dari Kitab *As-Siyar Al-Kabir* yang ditulis oleh Muḥammad ibn Al-Ḥasan As-Syabani dari Iraq. Selanjutnya perkembangan kajian politik Islam semakin meluas dan menjadi subyek yang menarik hingga saat ini.

Terbitnya buku *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah) yang mengkaji tentang dinamika Islam politik khususnya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir di tiga negara meliputi Turki, Mesir,

dan Indonesia ini sangat menarik untuk didiskusikan karena menggunakan pendekatan yang segar dan komparatif. Karya akademisi asal Indonesia yang kini menjadi guru besar di Asian Institute, Melbourne University, Australia ini ditulis dengan gaya novel dan menekankan pada faktor-faktor materialis atau ekonomi politik. Pertanyaan penelitian utama dalam buku ini berada di sekitar kompatibilitas Islam dan lembaga-lembaga demokratis liberal, ide politik elektoral, ekonomi pasar, dan nilai-nilai kemasyarakatan.

Berbeda dengan kebanyakan buku tentang politik Islam yang biasanya lebih banyak membahas pada faktor-faktor teologis. Dalam buku ini Vedi R. Hadiz mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi trajektori Islam politik di setiap negara berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung pada kondisi masing-masing, negara apakah melalui jalur elektoral (pemilihan umum) atau pemberontakan (kudeta). Trajektori tersebut meliputi tiga fase kunci yaitu fase pembentukan negara, fase pembangunan (terutama pada masa perang ideologi atau perang dingin), dan fase hegemoni demokrasi elektoral.

Namun sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang buku ini, maka ada baiknya bila kita memahami terlebih dahulu perbedaan antara politik Islam dan Islam politik. Politik Islam secara terminologi berarti sebuah tata cara dan sistem ketatanegaraan yang dilandasi oleh syariat dan hukum yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Sedangkan Islam politik dapat diartikan bahwa Islam sebagai subyek utama yang diterangkan dan ditegaskan sebagai politik atau dengan kata lain Islam yang mencakup tentang politik. Akan tetapi arti kata ini kemudian dipersempit oleh pelaku politik praktis di Indonesia menjadi sebuah istilah yang ditetapkan untuk suatu ideologi gerakan politik yang menghendaki Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Jadi jelas bahwa politik Islam dan Islam politik adalah dua hal yang berbeda. Ini menjadi penting untuk dipahami terlebih dahulu sebagai fondasi untuk memahami dan menganalisis buku yang diterbitkan oleh Cambridge University Press ini.

Populisme versi Vedi R. Hadiz Ini menjadi suatu kritik atau basis material diskursus baru terhadap pandangan populisme dari Ernesto Laclau dalam bukunya *On Populist Reason*. Dalam buku tersebut Laclau mendefinisikan populisme sebagai suatu ide atau pemikiran yang dapat menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda di

dalam masyarakat. Sedangkan konsep populisme yang dikemukakan Hadiz dalam buku ini adalah suatu bentuk gerakan atau aliansi dari lintas kelas yang asimetris. Populisme Islam dapat dikatakan sebagai gerakan atau entitas Islam yang berusaha mengintegrasikan dirinya pada sistem ekonomi kapitalis global dan secara politik mengintegrasikan diri ke dalam sistem politik liberal. Kendati dalam prakteknya terdapat aliansi tetapi sesungguhnya artikulasi dalam aliansi tersebut sangat terbatas dan bergantung kepada kekuatan kelas yang dominan. Hadiz mengungkapkan bagaimana diskursus populisme itu kemudian dibentuk oleh basis dukungan sosial yang berbeda-beda. Hal ini karena dukungan kelas tertentu tidak ada yang benar-benar netral, selalu dipengaruhi kepentingan, aliansi sosial, dan artikulasi politik tertentu pula. Terlebih agen-agen Islam politik dalam kajian ini cenderung berasal dari kelas borjuasi.

Pada pembahasan mengenai Turki, Hadiz mengungkapkan bahwa agen sosial telah berhasil menguasai negara setelah melalui serangkaian tantangan dari militer dan politik “Kemalisasi”. Elemen Islam politik di Turki kini tidak lagi menginginkan eksistensi status negara Islam secara militan. Mereka dari partai Islam yang sedang berkuasa telah setuju dengan bentuk negara yang sudah ada di Turki disertai pola-pola demokrasi, bahkan menjadi bagian kuat dari nexus ekonomi kapitalisme neo-liberal. Dalam hal ini penguasa dari Partai *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) telah mengikuti bentuk negara yang demokratis. Islam oleh AKP dijadikan sebagai simbol untuk menyatukan borjuasi besar dari setiap provinsi di Turki guna menyingkirkan kaum elit Kemalis dimana Partai AKP dan organisasi sayap-sayapnya dijalankan oleh kelas menengah dengan uang yang bersumber dari borjuasinya tersebut. Strategi tersebut ditujukan untuk merekatkan *lumpen proletar* di Turki yang dilakukan dengan cara memberikan semacam sedekah dan *charity*. Pilihan memberikan sedekah dan bukan subsidi anggaran negara yang berkelanjutan ini dilakukan karena politik Islam di Turki secara implementatif terkenal sangat kapitalis dan neo-liberal.

Sedangkan di Mesir, trajektori Islam politik berada pada tataran yang berbeda dengan di Turki. Setelah Mesir mengalami periode kolonisasi, perebutan pengaruh ideologi di perang dingin, dan kemudian proses pembangunan, *Ikhwanul Muslimin* (IM) justru berhasil menguasai masyarakat Mesir dan menjadi kekuatan oposisi politik yang paling kuat dan terorganisir di Mesir. Tapi di saat itu pula fakta menunjukkan bahwa IM

tidak cukup berhasil dalam menguasai negara. Hal ini dibuktikan dengan usia pemerintahannya yang relatif hanya sebentar saja dan justru akhirnya runtuh dengan pukulan balik yang telak dan mematikan. Meski IM di Mesir secara organisasional mirip dengan AKP di Turki, tapi dampak yang ditimbulkan IM tidak sebesar AKP karena mereka baru bisa berkembang di tahun 90-an. Menurut Hadiz, Islam di Mesir memang digunakan oleh IM untuk menjadi simbol politik untuk menyingkirkan elit dominan dari militer berkuasa sebagaimana di Turki. Namun faktanya kekuasaan IM di bawah rezim Mohammed Morsi justru runtuh dengan cepat di tangan Jenderal Abdel Fattah El-Sisi yang notabene berasal dari militer Mesir.

Adapun mengenai trajektori politik Islam di Indonesia, sejak zaman kolonial, pasca kolonial, dan melihat perkembangan kapitalisme dan neo-liberalisme di Indonesia. Hadiz melihat Islam sempat terpinggirkan di masa orde baru dan kemudian menjadi kekuatan oposisi yang cukup kuat di era reformasi. Namun dalam hal ini politik Islam tidak pernah benar-benar menjadi kekuatan masyarakat yang masif apalagi menguasai negara. Berbeda dengan Turki dan Mesir, sirkulasi elit borjuasi Islam di Indonesia mengalami stagnansi. Beberapa elit yang kemudian dapat bertahan merupakan hasil dari kroni-kroni pemerintahan Soeharto dengan model *erzast capitalism* (kapitalisme semu) sebagaimana yang ditulis oleh Kunio Yoshihara dimana ada persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Kekurangan dari buku setebal 240 halaman ini adalah minimnya konsep-konsep yang mampu menjawab pertanyaan teologis seputar politik Islam. Apakah kondisi di masing-masing negara tersebut semata-mata dipengaruhi oleh dinamika konstelasi ekonomi politik dan mobilisasi kapital. Atau malah karena adanya peran ide-ide dan tafsir teologis yang juga telah berubah seiring perkembangan zaman. Misalnya saja dari pemahaman Islam ortodok yang pada perkembangannya menjadi lebih bersifat politis dan pragmatis. Di samping itu muncul pertanyaan yang masih menjadi misteri dan belum terjawab dalam buku ini yaitu, jika memang populisme Islam bisa menjadi kekuatan yang mampu mendominasi dalam pemerintahan di suatu negara, lalu berapa lama aliansi tersebut bisa bertahan? Jika mengacu pada kasus Turki dan Mesir dapat diprediksi bahwa tampaknya populisme Islam tidak mampu bertahan dalam durasi kekuasaan yang lama.

Adapun yang patut diapresiasi dari buku ini adalah Hadiz berani menggunakan pendekatan yang lebih materialis dan sosialis pada Islam politik kontemporer. Dia berani keluar dari ortodoksi kajian Islam politik yang biasanya hanya menekankan pada aspek teologis. Sebuah pendekatan materialis menjadi penting dalam mempelajari Islam politik yang telah lama tertunda dan populisme Islam menyediakan contoh yang baik untuk dilakukan kajian-kajian lanjutan di masa depan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa buku ini juga memiliki kelemahan karena pada dasarnya analisis strategi politik yang dibahas sudah familiar digunakan oleh *religious populist* di Eropa, bukan hanya spesifik pada *Islamic populist*. Namun bagaimanapun juga terbitnya buku ini adalah sebuah pendekatan kritis dan kreatif untuk mempelajari Islam politik secara lebih komprehensif dan menunjukkan bahwa dalam kajian Islam politik masih banyak hal yang menarik untuk dieksplorasi.